

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini, yang bertujuan untuk membantu terciptanya manusia secara utuh memperoleh penghidupan yang baik.¹ Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas, dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral.

Tanggungjawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional Negara Indonesia salah satunya adalah “...Mencerdaskan kehidupan bangsa”.² Dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.³

Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah sebagai suatu lembaga yang melibatkan guru dan peserta didik. Guru sebagai pribadi adalah panutan bagi peserta didiknya. Guru tidak hanya mentranfer ilmu pengetahuan, namun

¹ Anonim, 1996, *Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Educatio, hal. 3.

² Alinea 4, Undang-Undang Dasar 1945

³ Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi peserta didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Namun dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik atau pun kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan.⁴⁵

Fenomena ini seperti dalam kasus yang terjadi pada seorang peserta didik di SMPN 1 Tambakromo, Kabupaten Pati, bernama Sony Permadi, mengaku ditonjok guru berulang kali di bagian mulut karena tak bisa bernyanyi dengan suara merdu alias fals.⁶ Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf d yang menyatakan “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika*”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan “*Hubungan guru dengan anak didik: (f) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan*”. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014

⁴ A. Ridwan Halim, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan filosofis-edukatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 41

⁵ *Ibid*, hal. 105-108

⁶ Koran Muria, Rabu, 30 September 2015, *Tonjok Siswa Bersuara Fals Guru SMP 1 Tambakromo di seret ke Pengadilan*, dalam <http://www.koranmuria.com/2015/09/30/1829/tonjok-siswa-bersuara-fals-guru-smp-1-tambakromo-diseret-ke-pengadilan> diakses Senin, 24 Oktober 2016, pukul 07.30 WIB.

tentang Perlindungan Anak menyatakan “*Anak di dalam lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain*”. Berdasar aturan tersebut jelas tindakan kekerasan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK OLEH GURU DI KABUPATEN PATI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru dalam lembaga Peradilan maupun diluar Peradilan ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan terhadap peserta didik oleh guru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

⁷ Hukum Online, “*Langkah hukum jika Anak ditempeleng Guru?*” dalam Klinik Hukum Online, Selasa, 29 Januari 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50fe23b4b6afa/langkah-hukum-jika-anak-ditempeleng-guru> diakses Senin, 10 Oktober 2016 pukul 20.15 WIB.

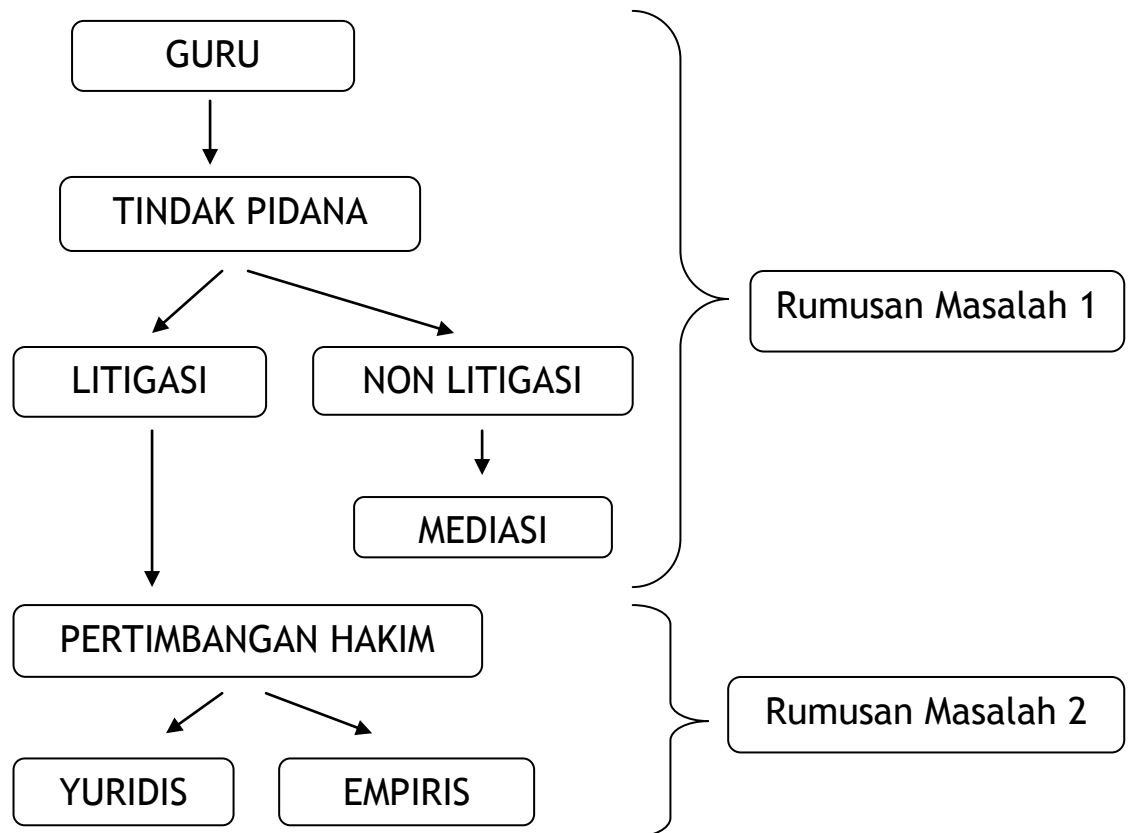
1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru dalam lembaga Peradilan maupun diluar Peradilan di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun sosiologis dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ini meliputi:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat lagi bagi ilmu hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman tentang proses penyelesaian kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru dalam lembaga Peradilan maupun diluar Peradilan.
 - b. Memberikan pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kekerasan terhadap peserta didik oleh guru.

E. Kerangka Pemikiran



Guru adalah panutan bagi anak didiknya, tidak hanya mentranfer ilmu pengetahuan, namun juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20 huruf d yang menyatakan “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika*”.

Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan “*Hubungan guru dengan anak didik: (f) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik*

yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan”.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.⁸ Peserta didik/anak didik adalah seseorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik ia mengembangkan potensi secara optimal. Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan *“Anak di dalam lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain”.*

Upaya penyelesaian kekerasan terhadap anak didik oleh guru, dapat dilakukan :

1. Non Litigasi atau penyelesaian di luar Peradilan, permasalahan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungan pendidikan (Sekolah) untuk mencari jalan keluar permasalahan secara kekeluargaan. Terhadap upaya hukum ini maka, tingkat pemberian sanksi akan mengikuti peraturan sekolah yang bersangkutan.
2. Litigasi atau penyelesaian dalam Lembaga Peradilan, dengan melaporkan guru yang bersangkutan kepada pihak kepolisian atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyelesaian kekerasan dalam Peradilan yaitu pertimbangan secara yuridis melihat fakta-fakta dalam proses persidangan. Dan pertimbangan empiris, mempermudah hakim dengan adanya fakta-fakta empiris, hakim memutus perkara mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, didasarkan oleh keyakinan hakim.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk menjelaskan proses penyelesaian kekerasan terhadap peserta didik oleh guru.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti secara yuridis berkaitan dengan peraturan-peraturan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia, yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh dilapangan atau secara empiris yaitu mengenai proses penyelesaian kekerasan terhadap anak didik oleh guru di Kabupaten Pati.

3. Lokasi Penelitian

⁹ Juanda Akbar, Sabtu, 22 Febuari 2014, <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/> diakses Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 15.12 WIB.

Penelitian ini bertempat di Lembaga Hukum (Kepolisian dan Pengadilan Negeri) dan apabila diperlukan juga lembaga pendamping yang berlokasi di kabupaten Pati. Lokasi tersebut dipilih karena penulis bertempat tinggal di wilayah kabupaten Pati, sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan,¹⁰ berupa hasil wawancara, salinan putusan pengadilan negeri Pati, dan riset data kepolisian mengenai kasus dan Proses Penyelesaian Kekerasan terhadap Peserta Didik oleh Guru di Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data Sekunder.¹¹ yaitu :

- 1) Undang-undang yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan-bahan pustaka berupa literatur, artikel, karya ilmiah dan informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hal. 12.

¹¹ Ibid, hal. 12.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait objek yang dikaji.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, penulis memberikan point-point pertanyaan kepada kepolisian berkaitan tentang kasus kekerasan peserta didik oleh guru seperti halnya proses penyelesaian kasus, jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, dan bagaimana langkah penanggulangan agar tidak lagi terjadi kasus tersebut.

c. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang memahami kebenaran dan karakteristik dari objek dan subjek kasus yang di teliti serta disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penyelesaian kekerasan terhadap peserta didik oleh guru yang didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Polres Pati, untuk kemudian ditemukan hukum dalam kenyataannya dan diambil suatu hasil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut :

Pada BAB I berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada BAB II penulis menguraikan tentang tinjauan umum kekerasan, pengertian peserta didik dan guru, dasar hukum perlindungan anak, proses penyelesaian kekerasan anak didik oleh guru.

Pada BAB III memuat uraian-uraian pembahasan tentang hasil penelitian, yang dapat berguna untuk menjawab rumusan masalah yaitu proses penyelesaian kekerasan terhadap anak didik oleh guru, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kekerasan terhadap anak didik oleh guru.

Pada BAB IV berisi penutup penelitian hukum ini yang memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran penulis kepada para pihak terkait.

Daftar Pustaka.

Lampiran-Lampiran.